

**PENYALAHGUNAAN KTP SEBAGAI DATA PRIBADI SECARA
TIDAK SAH FOTO SELFIE DAN KTP SEBAGAI SYARAT
PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI



OLEH:

ISTI ZULFA MARDHOTILLAHI

NPM : 18300094

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PENYALAHGUNAAN KTP SEBAGAI DATA PRIBADI
SECARA TIDAK SAH FOTO SELFIE DAN KTP
SEBAGAI SYARAT PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ISTI ZULFA MARDHOTILLA

NPM: 18300094

SURABAYA, 15 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING,

DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ISTI ZULFA MARDHOTILAH

NPM : 18300094

Alamat : JL. Panglima Sudirman Gg TPI Timur Karangsari
Tuban

No. Telp. (HP) : 0895401714387

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "Penyalahgunaan KTP sebagai data pribadi secara tidak sah foto selfie dan KTP sebagai syarat pinjaman online" adalah Murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Tuban, 7 September 2021



NPM : 18300094

**PENYALAHGUNAAN KTP SEBAGAI DATA PRIBADI
SECARA TIDAK SAH FOTO SELFIE DAN KTP
SEBAGAI SYARAT PINJAMAN ONLINE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ISTI ZULFA MARDHOTILLAH

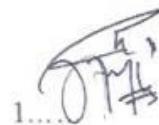
NPM: 18300094

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 15 DESEMBER 2021

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H (Ketua Penguji)

1....


2. Ahmad Basuki. S.H., M.H (Anggota Penguji)

2....


3. Dr. Titik Suharti. S.H., M.Hum (Anggota Penguji)

3....


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu penulis haturkan ke hadirat Allah Swt., karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang penulis buat dengan judul “pertanggung jawaban pidana bagi pelaku jual beli foto selfie dengan KTP sebagai syarat pinjaman Online” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat akademik memeroleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan hukum, Fakultas hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Selesainya tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan , bantuan dan doa dari berbagai pihak . Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan yang begitu luar biasa kepada :

1. Prof. Dr. H Widodo Ario Koentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan menjadi anggota dalam keluarga besar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memfasilitasi segala sesuatu sebagai penunjang dalam pembelajaran selama proses perkuliahan dari awal hingga saat ini
3. Ibu Titik Suharti, S.H,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dengan baik serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu Hukum dan membimbing Dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaaya

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas Pelayanannya selama mengikuti perkuliahan

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayah tercinta H.Kadam Sutrisno dan Ibu tercinta Hj Suprapti, serta kakak-kakaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan agar saya mampu selalu melangkah maju dan doa baik yang tidak pernah berhenti

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Sahabat Terbaik dan Tersayang Delinaamr, Wiwid, Nirma, Gusnia, Resya, Anisatun, Nony, April, Alvira , Septa,Alvira. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus terutama khususnya bagi penulis pribadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORSINALITASI	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	3
C. Manfaat Penelitian	3
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian	10
F. Pertanggungjawaban Sistematika	15
 BAB II: MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK DATA PRIBADI	
A. Perlindungan Hukum Pemilik Data Pribadi	16
B. Mekanisme Perlindungan Hukum Data Pribadi	18
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DATA PRIBADI ORANG LAIN	
A. Pertanggungjawaban Pidana	30
B. Pertanggungjawaban Hak Negara atas Hak Privasi	42
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
 DAFTAR BACAAN	

Abstrak

Teknologi membawa banyak kemajuan dalam bidang kehidupan. Salah satu perkembangan pesat yang dapat dilihat dari adanya era globalisasi adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dilihat secara langsung adalah penggunaan internet. Penggunaan internet sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi semua konsumennya dan Internet membawa berbagai perkembangan , salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ekonomi. Salah satunya penyelanggara layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk yaitu perseroan terbatas (PT) dan Koperasi yang membutuhkan data pribadi konsumennya seperti nama , KTP (Kartu tanda Penduduk) NIK (nomor induk keluarga) alamat , nomor telepon bahkan , berbeda dengan pinjaman online ilegal tidak berbadan hukum dan hanya bermodal aplikasi pada website. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tindak pidana kejahatan yang terjadi. Untuk itu maka perlu adanya perlindungan bagi korban yang foto selfienya di perjualbelikan serta Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku jual beli foto selfie dengan KTP

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif , dengan menggunakan bahan hukum seperti perundang-undangan, literatur huku, jurnal hukum serta analisa bahan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peraturan perlindungan hukum yang jelas dan juga pertanggung jawaban pelaku akibat dari tindak kejahatan yang telah di lakukannya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan perlindungan korban kejahatan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, perlindungan korban, media

Abstract

Technology brings many advances in the field of life. One of the rapid developments that can be seen from the era of globalization is developments in the field of information technology. The development of information technology that can be seen directly is the use of the internet. The use of the internet today has become a necessity for all consumers and the Internet has brought various developments, one of which is developments in the economic field. One of them is the provider of information technology-based loan lending services in the form of limited liability companies (PT) and cooperatives that require consumer personal data such as name, ID card (KTP) NIK (family parent number), address, telephone number, even different from illegal online loans. not a legal entity and only with an application on the website. This results in an increase in the number of crimes that occur. For this reason, there is a need for protection for victims whose selfie photos are traded and criminal liability for perpetrators of buying and selling selfie photos with ID cards.

The research methodology used in this thesis research consists of normative juridical research, using legal materials such as legislation, legal literature, legal journals and analysis of legal materials to solve existing problems.

Based on the results of the study, it can be concluded that there is a need for clear arrangements and also the responsibility of the perpetrators as a result of the crimes they have committed. This needs to be the government's attention in protecting the victims of crime.

Keywords: Accountability, victim protection, social media